

**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP KINERJA
KEUANGAN**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

BENEDICTUS DIMAS WIDYATAMA
NIM. C2C009184

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Benedictus Dimas Widyatama
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009184
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN**
Dosen Pembimbing : Drs. Agustinus Santosa Adiwibowo, MSi.,Akt.

Semarang, 4 Maret 2015

Dosen Pembimbing

Drs. Agustinus Santosa Adiwibowo, MSi.,Akt.

NIP. 19581010 198603 1005

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Benedictus Dimas Widyatama
Nomor Induk Mahasiswa : C2C0009184
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 18 Maret 2015

Tim Penguji:

1. Drs. Agustinus Santosa Adiwibowo, M.Si.,Akt. (.....)

2. Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si., Akt (.....)

3. Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Benedictus Dimas Widyatama, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 4 Maret 2015

Yang membuat pernyataan,

Benedictus Dimas Widyatama

NIM. C2C009184

ABSTRACT

In measuring the financial performance of a company can be seen in several indicators including Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return on Equity (ROE), Financial Leverage (FL), Debt to Equity Ratio (DER), Current Assets (CA), dan Return on Assets (ROA). Some of these indicators are used as a guideline for investors to assess the financial performance, but not all of the information that stated in the financial statements was stated properly. In the company that their corporate governance is not running well,, there can be a discrepancy between the information that stated in the financial statements with the fact that happen in company. Corporate governance mechanism is expected to minimize the agency problems so the financial performance can be increase. The purpose of this study is to analyze the effect of corporate governance mechanisms on financial performance.

The population in this study are all manufacturing companies listed on the Stock Exchange in 2011 until 2013. The sampling method used in this study was purposive sampling method. The total number of samples in this study were 90 research samples. This study used multiple linear regression as analysis instrument. Before doing the regression test, it's examined by using classical assumption test.

The results of this study indicate the size of the audit committee, managerial ownership, and the number of audit committee meetings do not affect the financial performance. While the number of board meetings significant negative effect. From this study only board size and independence of the board of commissioners that significant positive effect on financial performance.

Keywords: *corporate governance, earning per share, financial performance.*

ABSTRAK

Dalam melakukan pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dalam beberapa indikator diantaranya Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return on Equity (ROE), Financial Leverage (FL), Debt to Equity Ratio (DER), Current Assets (CA), dan Return on Assets (ROA). Beberapa indikator tersebut yang dijadikan panduan oleh investor dalam menilai kinerja keuangan, tetapi tidak semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan benar. Dalam perusahaan yang tata kelolanya kurang baik, dapat terjadi ketidaksesuaian antara informasi dalam laporan keuangan dengan kondisi di lapangan dalam perusahaan. Mekanisme *corporate governance* diharapkan dapat meminimalisir *agency problem* sehingga tercipta kinerja keuangan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Metode *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Jumlah total sampel dalam penelitian ini sebanyak 90 sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Sebelum dilakukan uji regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran komite audit, kepemilikan manajerial, dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan. Dari penelitian ini hanya ukuran dewan komisaris dan independensi dewan komisaris yang berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Kata Kunci: *corporate governance, earning per share*, kinerja keuangan.

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Siapa menabur dia akan menuai”

“Bersukacitalah dalam harapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa” – (Roma 12 : 12)

“Something that has not been done, often seems impossible; We just believe that we have managed to do well” – Evelyn Underhill

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Ayah, ibu, dan kakak tercinta.

Partner dan sahabat-sahabatku tersayang

Terima kasih untuk dukungan, semangat, dan doanya

yang senantiasa mengiringi setiap langkahku.

You're the greatest gift from God and I'm thankful to have you all.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan. (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2011-2013) sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Universitas Diponegoro.

Selama penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi
3. Bapak Drs. Agustinus Santosa Adiwibowo, MSi.,Akt. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, dukungan dan pengertian selama penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt.. selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dalam menjalani masa perkuliahan.

5. Seluruh Bapak Ibu dosen dan seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro terutama jurusan Akuntansi, atas ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan.
6. Keluarga tercinta, Bapak Harry Winarno, Ibu Sri Widayati, dan Arnolda Prisca, terima kasih atas doa, nasihat, motivasi dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Jovita Bella Pratiwi, terima kasih atas perhatian, doa, kasih sayang, motivasi, dan semangat yang diberikan selama ini, serta kesabaran dalam mendukung dan menghadapi penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. *Keep dreaming and realize it together!*
8. Dominikus Oktavianto, terimakasih atas bantuannya yang sangat luar biasa bagi penulis atas waktu dan ilmu yang diberikan serta membantu penulis dalam menganalisis data.
9. Ivan Herdyanto, Ridho Alief, Diyan Hafdinovianti, Angelia Dewi Anggraini, dan Sheila Aprilia Putri, terima kasih atas segala doa, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
10. Teman seperjuangan, Yudha, David, Aditya, Rovelino, Wibi, Ajeng, terima kasih untuk semangat dan dorongan selama ini.
11. Sahabat payung 2009: Hemi, Galih, Bima, Annas, Temmy, Dian, Didot, Achi, Santi, Glory, Luanda, terima kasih untuk candaan serta kegilaannya selama ini, *see you all on top!*
12. Tim KKN Desa Kaliwareng, Nandang, Oscar, Vicky, Leo, Shintia, Yose, Sari, Kiki.

13. Keluarga Besar Reguler 2 Akuntansi 2009, terima kasih atas kebersamaannya selama ini, semoga kita sukses dan akan terus seperti keluarga.
14. Keluarga Besar PRMK FEB UNDIP, Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
15. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari kekurangan dan keterbatasan penulis selama penyusunan skripsi ini. Sehingga saran dan kritik diharapkan untuk perbaikan di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 4 Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SRIPSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah.....	8
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Manfaat Penelitian	10
1.4.Sistematika Penulisan	10
 BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1.Landasan Teori	12
2.1.1. Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	12
2.1.2. <i>Good Corporate Governance</i>	14
2.1.3. Struktur Corporate Governance	17
2.1.3.1.Ukuran Dewan Komisaris.....	18
2.1.3.2.Independensi Dewan Komisaris	19
2.1.3.3.Ukuran Komite Audit	21
2.1.3.4.Jumlah Rapat Komite Audit	22
2.1.3.5.Jumlah Rapat Dewan Komisaris.....	23
2.1.4. Struktur Kepemilikan.....	24
2.1.5. Kinerja Keuangan	26

2.2. Penelitian Terdahulu	27
2.3. Kerangka Pemikiran	29
2.4. Hipotesis	30
2.4.1. Hubungan antara ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan	31
2.4.2. Hubungan antara independensi dewan komisaris terhadap kinerja keuangan	32
2.4.3. Hubungan antara ukuran komite audit terhadap kinerja keuangan	33
2.4.4. Hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan	34
2.4.5. Hubungan antara jumlah rapat komite audit terhadap kinerja keuangan	35
2.4.6. Hubungan antara jumlah rapat dewan komisaris terhadap kinerja keuangan	36

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	38
3.1.1. Variabel Dependen	38
3.1.2. Variabel Independen	39
3.1.2.1. Ukuran Dewan Komisaris	39
3.1.2.2. Independensi Dewan Komisaris	39
3.1.2.3. Ukuran Komite Audit	40
3.1.2.4. Kepemilikan Manajerial	40
3.1.2.5. Jumlah Rapat Komite Audit	41
3.1.2.6. Jumlah Rapat Dewan Komisaris	41
3.2. Populasi dan Sampel	42
3.3. Jenis dan Sumber Data	43
3.4. Metode Pengumpulan Data	43
3.5. Metode Analisis	43
3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif	43
3.5.2. Uji Asumsi Klasik	44
3.5.2.1. Uji Normalitas	44
3.5.2.2. Uji Heteroskedastisitas	45
3.5.2.3. Uji Multikolonieritas	45
3.5.2.4. Uji Autokorelasi	46
3.5.3. Analisis Regresi	46
3.5.4. Uji Hipotesis	47
3.5.4.1. Uji Signifikan Parameter Individual	47
3.5.4.2. Uji Signifikan Simultan	47
3.5.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	47

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian	49
4.2. Analisis Data	51

4.2.1. Analisis Deskriptif	51
4.2.2. Uji Asumsi Klasik	54
4.2.2.1. Uji Normalitas	54
4.2.2.2. Uji Multikolonieritas	55
4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas	56
4.2.2.4. Uji Autokorelasi	58
4.2.3. Uji Hipotesis	59
4.2.3.1. Uji Koefisien Determinasi	59
4.2.3.2. Uji Signifikansi Simultan	60
4.2.3.3. Uji Signifikansi Parameter Individual	60
4.2.3.4. Hasil Uji Hipotesis	61
4.3. Intrepretasi Hasil	63
 BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Keterbatasan Penelitian	69
5.3. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4.1 Ringkasan Pengambilan Sampel Penelitian.....	49
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	51
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas	55
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas	56
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	58
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi	59
Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik F.....	60
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik T	61
Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.1. Uji Normalitas Residual.....	54
Gambar 4.2. Uji Heteroskedastisitas.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A: Tabulasi Data.....	73
Lampiran B: Hasil Output Spss	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (Much Nurachmad). Perkembangan teknologi dan arus informasi yang berkembang pesat pada saat ini menuntut perusahaan untuk dapat menyajikan informasi yang berguna bagi pengguna informasi, seperti investor dan stakeholder. Hal itu menyebabkan persaingan antar perusahaan semakin ketat dan kompetitif. Perusahaan harus menunjukkan kinerja yang baik agar pihak eksternal (investor) mau menanamkan modal pada perusahaan.

Kinerja keuangan perusahaan menggambarkan bagaimana cara dan berapa banyak sumber daya keuangan yang tersedia untuk menjalankan kegiatan produksi perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan, karena kinerja merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya (Madevi, 2011). Globalisasi memunculkan adanya persaingan yang ketat antar perusahaan. Banyak perusahaan yang saling berlomba untuk memaksimalkan kinerja perusahaannya, karena kinerja perusahaan yang baik akan menarik investor untuk

menanamkan modal di perusahaan tersebut. Bertambahnya modal yang berasal dari investor tersebut akan menciptakan prospek yang lebih besar bagi masa depan perusahaan.

Bukti yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan adalah laporan keuangan perusahaan yang baik dan sesuai standar yang berlaku, yaitu PSAK. Laporan keuangan merupakan output akhir dalam proses akuntansi. Laporan keuangan mempunyai peranan penting bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuah perusahaan. Menurut IAI (2011) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja perusahaan, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan perusahaan menunjukkan posisi keuangan perusahaan dan juga indikator kinerja perusahaan seperti Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return on Equity (ROE), Financial Leverage (FL), Debt to Equity Ratio (DER), Current Assets (CA), dan Return on Assets (ROA). Beberapa indikator tersebut yang dijadikan panduan oleh investor dalam menilai kinerja perusahaan. Namun tidak semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan benar. Dalam perusahaan yang tata kelolanya kurang baik, bisa terjadi ketidaksesuaian antara informasi dalam laporan keuangan dengan kondisi di lapangan dalam perusahaan.

Isu mengenai *Corporate Governance* mulai terkemuka sejak terjadi krisis ekonomi yang melanda negara-negara di Asia termasuk Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Boediono (dalam

Hardikasari, 2011) menyebutkan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan (financial reporting) yang berawal dari terdeteksinya indikasi manipulasi.

Rendahnya corporate governance, hubungan investor yang lemah, kurangnya tingkat transparansi, ketidak efisienan dalam laporan keuangan, dan masih kurangnya penegakan hukum atas perundang-undangan dalam menghukum pelaku dan melindungi pemegang saham minoritas, menjadi pemicu dan alasan beberapa perusahaan di Indonesia runtuh (Hardikasari, 2011). Akumulasi permasalahan yang terjadi ini menyebabkan timbulnya perhatian yang besar terhadap kebutuhan untuk meningkatkan kepedulian terhadap standar pengelolaan perusahaan, meningkatkan transparansi dan memperbaiki hubungan investor, lembaga regulator seperti BAPEPAM dan BEI harus menekan pentingnya penegakan hukum yang lebih efektif.

Mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Good Corporate Governance (GCG) merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, dimana didalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham (publik) sebagai pemilik perusahaan dan kreditor sebagai penyandang dana eksternal Mekanisme Corporate Governance yang baik akan memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan direktur untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan (Hapsari, 2011).

Menurut Graham et al (dalam Che Hat, 2008), biaya yang dikeluarkan akibat tata kelola perusahaan yang buruk sebagian besar ditanggung oleh pemegang saham minoritas, seperti yang terjadi di pasar negara berkembang seperti Indonesia dimana banyak perusahaan publik yang dimiliki keluarga. Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan investor adalah memiliki praktek-praktek tata kelola perusahaan yang baik yang dapat menyebabkan laporan keuangan yang lebih baik serta pengungkapan dan pelaporan bisnis yang lebih transparan.

Menurut Arifin (2005) tujuan *good corporate governance* pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Namun dalam praktiknya, *corporate governance* berbeda di setiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya.

Konsep *good corporate governance* di Indonesia mulai diperkenalkan pada tahun 1999 setelah pemerintah membentuk Komite Nasional tentang Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) melalui Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999 tentang pembentukan KNKCG yang menerbitkan Pedoman GCG Indonesia. Dengan peraturan yang berfokus pada tata kelola perusahaan yang diperkenalkan oleh pihak berwenang Indonesia (sebagai bagian dari agenda reformasi tata kelola perusahaan). Saat ini telah dibentuk

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai pengganti KNKCG (Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance) melalui Surat Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004 yang didasari pandangan luas bahwa tata kelola perusahaan yang lebih baik berkaitan dengan kinerja yang lebih baik.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme dalam penerapan *corporate governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan (*agency conflict*). Crutchley dan Hansen (1989), Bathala *et al.* (1994) dalam Faisal (2005) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan. Bathala *et al.* (1994) juga menemukan kepemilikan institusional menggantikan kepemilikan manajerial dalam mengontrol *agency cost*. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja keuangan juga akan meningkat.

Penerapan mekanisme *good corporate governance* dalam perusahaan tidak semudah memahami konsepnya. Penyimpangan masih bisa muncul akibat tidak adanya integritas dari manajemen perusahaan. Timbulnya ketidak taatan, kesalahan pahaman, konflik peran, serta fungsi pengambilan keputusan diantara pengelola perusahaan, dan bahkan manipulasi keuangan oleh pihak direksi maupun manajer merupakan penyimpangan yang dapat muncul dalam proses penerapan.

Keberhasilan penerapan *corporate governance* tidak hanya bergantung pada prinsip dan peraturan yang ada, melainkan bergantung pada integritas dan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Etika dan budaya kerja, serta prinsip-prinsip kerja profesional memegang peranan penting dalam penerapan *corporate governance* (Rini, 2012).

Penelitian mengenai hubungan antara Corporate Governance dengan kinerja perusahaan telah banyak dilakukan. Salah satunya oleh Sekaredi (2011), penelitian dilakukan dengan metode purposive sample. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 18 perusahaan yang secara konsisten terdaftar sebagai perusahaan LQ45 periode tahun 2005 sampai dengan 2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (CFROA), dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan dewan komisaris berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Sementara dewan direksi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pasar (Tobins Q), sedangkan komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pasar.

Penelitian-penelitian lainnya yang juga mencoba menjelaskan hubungan antara Corporate Governance dengan kinerja perusahaan dilakukan oleh Darmawati et al (2005). Penelitian ini menggunakan hasil survei IICG (The Indonesian Institute for Corporate Governance) dan majalah SWA tentang implementasi good corporate governance didalam perusahaan antara tahun 2001-2002 yaitu CGPI (Corporate Governance Perception Index) sebagai proksi

variabel corporate governance sedangkan untuk mengukur kinerja perusahaan menggunakan ROE (Return on Equity) dan nilai pasar perusahaan (Tobin's Q).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel corporate governance secara statistik signifikan memengaruhi ROE namun tidak memengaruhi Tobin's Q. Sedangkan penelitian lainnya yang dilakukan Pranata (2007) menemukan bahwa good corporate governance berpengaruh positif terhadap ROE, Tobin's Q, dan NPM (Net Profit Margin).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkuat hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Pada penelitian ini akan digunakan variabel-variabel *corporate governance* yaitu Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial Perusahaan yang mengacu pada penelitian Noviawan (2013). Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi dan melakukan pengendalian intern dalam perusahaan, sehingga semakin banyak jumlah dewan komisaris dan semakin independen dewan komisaris maka pengendalian intern perusahaan akan semakin baik. Ukuran komite audit juga berpengaruh pada baik tidaknya kinerja keuangan. Semakin semakin banyak komite audit perusahaan dapat terhindar dari manajemen laba, maka kontrol terhadap perusahaan akan berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan. Struktur kepemilikan perusahaan berpengaruh besar terhadap kinerja keuangan, terutama apabila terdapat kepemilikan manajerial pada perusahaan tersebut. Dewan direksi yang memiliki saham pada perusahaan

tersebut pasti menginginkan kinerja perusahaan yang maksimal sehingga mendapatkan keuntungan lebih dari presentase kepemilikan saham tersebut.

Selain itu, dalam penelitian ini terdapat dua variabel baru yaitu Jumlah Rapat Komite Audit dan Jumlah Rapat Dewan Komisaris. Jumlah Rapat Komite Audit adalah jumlah keseluruhan rapat dari Komite Audit dalam satu periode, sedangkan Jumlah Rapat Dewan Komisaris adalah jumlah dari rapat Dewan Komisaris dalam satu periode.

Prosedur rapat yang diadakan oleh komite audit telah diatur dalam peraturan Bapepam-LK Nomor. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yaitu komite audit melakukan rapat sekurang-kurangnya sama dengan sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan oleh anggaran dasar. Ini berarti Komite Audit serta Dewan memiliki kewajiban untuk melakukan rapat di setiap periode. Kedua variabel baru ditambahkan dalam penelitian guna memperkuat penelitian terdahulu mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan.

1.2. Rumusan Masalah

Kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh mekanisme *good corporate governance*, yaitu : Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Manajerial Perusahaan, Jumlah Rapat Komite Audit dan Jumlah Rapat Dewan Komisaris. Pada penelitian sebelumnya pengukuran kinerja keuangan menggunakan ROE (Return On Equity) pada penelitian ini pengukuran kinerja keuangan akan menggunakan EPS (Earning Per

Shares). Sehingga secara spesifik, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah kepemilikan manajerial perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
5. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
6. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka uraian secara rinci tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan.
2. Menganalisis pengaruh independensi dewan komisaris terhadap kinerja keuangan.
3. Menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap kinerja keuangan.

4. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial perusahaan terhadap kinerja keuangan.
5. Menganalisis pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap kinerja keuangan.
6. Menganalisis pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap kinerja keuangan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan referensi tambahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh corporate governance terhadap kinerja keuangan.
2. Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan perusahaan mengenai pentingnya penerapan good corporate governance dalam perusahaan.

1.4. Sistematika Penelitian

Skripsi ini dibagi menjadi lima bagian dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini membahas tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dan mendukung analisis serta pemecahan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Bab ini juga berisi uraian hipotesis-hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, serta model penelitian yang akan diuji.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi uraian metode penelitian yang terdiri dari: desain penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas tentang karakteristik responden, hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan, hasil pengujian asumsi klasik, hasil pengujian analisis jalur, hasil pengujian hipotesis, dan uraian analisis data yang berisi hasil pengolahan data serta interpretasi terhadap hasil tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan dikembangkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Teori keagenan merupakan sebuah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara principal dan agen. Yang dimaksud dengan principal adalah pemilik perusahaan atau pemegang saham, sedangkan agent adalah manajer perusahaan. Pemilik perusahaan mendelegasikan suatu tanggung pengambilan keputusan kepada manajer sesuai dengan kontrak kerja. Tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab pemilik perusahaan dan manajer telah diatur dalam kontrak kerja yang disepakati bersama.

Pihak manajemen bertanggung jawab secara moral dan profesional menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan operasi dan laba perusahaan. Sebagai imbalannya, manajer akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Sementara pemilik perusahaan melakukan kontrol terhadap kinerja manajer perusahaan untuk memastikan modal yang dimiliki dikelola dengan baik. Motifnya tentu saja agar modal yang telah ditanamkan berkembang dengan optimal.

Pihak principal sebagai pemilik perusahaan dan pihak yang memberikan mandat terhadap manajer, memberikan kewajiban kepada agent untuk memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan. Informasi yang diberikan

tersebut berguna sebagai sarana pengawasan terhadap manajer oleh para pemilik perusahaan, untuk memastikan modal yang mereka tanamkan berkembang dengan baik. Jika kinerja agent yang ditunjukkan dalam laporan yang diterima oleh principal tidak memuaskan, principal dapat mengambil tindakan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Dengan demikian di dalam satu perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda. Kepentingan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan milik principal dan kepentingan pribadi agen yang memegang tanggung jawab besar untuk mendapat imbalan yang besar pula, dengan kata lain kepentingan pribadi dari agen sendiri. Posisi agen sebagai pemegang kunci informasi dan principal sebagai penerima informasi dapat memicu munculnya asimetri informasi (information asymetri), yaitu suatu kondisi dimana informasi yang diperoleh oleh pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemilik perusahaan secara umum tidak seimbang.

Teori keagenan menyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi yang timbul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan dari berbagai pihak dalam perusahaan. Mekanisme ini dapat dilakukan dengan menerapkan corporate governance. Penerapan corporate governance dapat memberikan kepercayaan kepada pemilik perusahaan terhadap kemampuan manajemen dalam mengelola kekayaan yang dimiliki oleh pemilik (pemegang saham), sehingga dapat meminimalisasi konflik kepentingan. Good corporate governance menghasilkan berbagai mekanisme yang

bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen sudah selaras dengan kepentingan pemegang saham (Susiana dan Herawaty, 2007).

2.1.2. Good Corporate Governance

Di Indonesia, konsep *good corporate governance* mulai diperkenalkan sejak tahun 1999 ketika pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). KNKG telah mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia pada tahun 2000 yang kemudian direvisi pada tahun 2006. Isi dari pedoman tersebut adalah setiap perusahaan wajib membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan *good corporate governance* dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh KNKG dalam laporan tahunannya. Hal ini berarti setiap perusahaan telah menerapkan prinsip *good corporate governance*.

Untuk mewujudkan *good corporate governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia terdapat dua aspek keseimbangan, internal dan eksternal (Arifin, 2005). Keseimbangan internal dapat dicapai dengan cara menyajikan informasi yang berguna dalam evaluasi kinerja, informasi tentang sumber daya yang dimiliki perusahaan, semua transaksi dan kejadian internal, dan informasi untuk keputusan manajemen internal. Sedangkan keseimbangan eksternal dapat dicapai dengan cara menyajikan informasi bisnis kepada para pemegang saham, kreditur, bank, dan organisasi lainnya yang berkepentingan.

Terjadinya *agency problem* diyakini dapat diminimalisir dengan mekanisme *good corporate governance*. Dalam teori agensinya Jensen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa *agency problem* timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (*Principal*) dengan manajemen

(*Agent*). Untuk memunculkan keselarasan antara pemilik perusahaan dan manajemen, diperlukan transparansi dari pihak manajemen kepada pemilik perusahaan, serta keadilan kepada *stakeholders* lain. (Al-Faki 2006).

Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia disebutkan ada lima asas *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang berkepentingan

1. Transparansi (Transparency)

Asas ini berhubungan dengan kualitas dan keterbukaan mengenai informasi yang disajikan oleh perusahaan. Pada asas ini mewajibkan adanya informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut kondisi keuangan, pengelolaan perusahaan, pengambilan keputusan dan kepemilikan perusahaan.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Pada asas akuntabilitas perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan independen, sehingga perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dengan tetap mempertimbangkan kepentingan *stakeholders* lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (Responsibility)

Asas responsibilitas dapat diartikan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan asas ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan dampak negatif yang harus ditanggung masyarakat

4. Independensi (Independency)

Untuk memungkinkan dilaksanakannya asas-asas Corporate Governance lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran (Fairness)

Pada asas kewajaran perusahaan harus senantiasa memperhatikan pada perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, termasuk pemegang saham asing serta investor lainnya. Prinsip ini diharapkan untuk membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati sehingga terdapat perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil. Penegakan prinsip fairness

menyaratkan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten, dan dapat ditegakkan secara baik serta efektif.

Kelima asas tersebut membantu perusahaan untuk meminimalisir adanya *agency problem*, sehingga kinerja keuangan dapat menjadi lebih baik.

Menurut Arifin (2005) tujuan dari penerapan *good corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut adalah pihak internal perusahaan seperti dewan direksi, dewan komisaris, karyawan, dan pihak eksternal perusahaan yang meliputi investor kreditur, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Tetapi dalam praktiknya, penerapan *good corporate governance* berbeda-beda di hampir setiap negara karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini menimbulkan beberapa versi yang menyangkut prinsip-prinsip *good corporate governance*, namun pada dasarnya memiliki banyak kesamaan.

2.1.3. Struktur Corporate Governance

Corporate governance merupakan suatu struktur yang mengatur pola hubungan organ perusahaan (direksi, komisaris), pemegang saham, serta para *stakeholders* lainnya melalui sebuah sistem pengawasan dan perimbangan wewenang atas pengendalian perusahaan yang mengacu pada tujuan perusahaan. Struktur corporate governance dapat diartikan sebagai suatu kerangka dalam organisasi untuk menerapkan berbagai prinsip governance sehingga prinsip

tersebut dapat dibagi, dijalankan, serta dikendalikan. Hal ini berarti, struktur governance harus mampu mendukung tata kelola perusahaan.

Mekanisme corporate governance merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang mengawasi atau mengontrol pengambilan keputusan. Iskander dan Chamlou (2000) berpendapat bahwa mekanisme dalam pengawasan corporate governance dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan board of director. Sedangkan mekanisme eksternal adalah cara memengaruhi perusahaan dengan cara selain mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pasar.

Mekanisme atau struktur governance dalam penelitian ini mengacu kepada hal-hal yang telah disebutkan oleh Iskander dan Chamlou (2000) dan akan dijelaskan dalam sub-bab berikut ini.

2.1.3.1. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan wakil dari para pemegang saham yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dan mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen (Mulyadi 2002). Dewan komisaris bertanggung jawab memonitor kinerja manajerial dalam mencapai tingkat timbal balik (return) yang memadai bagi pemegang saham.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 108 ayat (5) menjelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Maka, jumlah anggota Dewan Komisaris di Indonesia bervariasi disesuaikan menurut kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *corporate governance* sesuai dengan aturan yang berlaku. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam rangka mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Lestariningsing 2008). Oleh karena itu, dewan komisaris berpengaruh besar dalam penyelenggaraan *corporate governance* oleh perusahaan.

2.1.3.2. Independensi Dewan Komisaris

Perusahaan yang telah melakukan *corporate governance* diwajibkan untuk memiliki dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen anggotanya tidak berasal dari dewan komisaris, dewan direksi ataupun para pemegang saham. Karena dewan komisaris independen berfungsi sebagai pemisah kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) komisaris independen memiliki kriteria, antara lain:

1. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen.

2. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas perusahaan.
3. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisis seperti itu.
4. Komisaris independen bukan merupakan penasihat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
5. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
6. Komisaris independen tidak memiliki kontrak kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
7. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan yang dapat atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan

kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

Dewan komisaris independen diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Proporsi minimum dewan komisaris independen adalah 30% dari keanggotaan dewan komisaris. Proporsi dewan komisaris dalam suatu perusahaan berpengaruh terhadap fungsi pengawasan dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Karena semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen, maka semakin baik pula fungsi pengawasan dalam perusahaan. Sehingga komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pelaksanaan *corporate governance* dalam perusahaan.

2.1.3.3. Ukuran Komite Audit

Komite audit dalam suatu perusahaan bertanggung jawab dalam pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit adalah suatu komite yang berfungsi memberikan pandangan tentang permasalahan akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen (Egon Zehnder International, 2000). Dengan adanya komite audit akan memperkecil kemungkinan manajemen melakukan manajemen laba (*earning management*) dengan cara melakukan pengawasan atas laporan keuangan dan pengawasan dari audit eksternal.

Menurut Peraturan BAPEPAM Kep 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit juga dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen guna mengatasi

masalah pengendalian ataupun timbulnya *agency problem*. Dalam Peraturan BAPEPAM Kep 29/PM/2004 mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, yang memiliki tugas, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
3. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
4. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan

2.1.3.4. Jumlah Rapat Komite Audit

Jumlah rapat komite audit mengacu pada kesediaan anggota komite audit untuk bekerja sama untuk mempersiapkan, mengajukan pertanyaan, dan mengejar jawaban ketika berhadapan dengan manajemen, auditor internal, auditor eksternal, dan pihak-pihak lain yang relevan (DeZoort, 2002).

Prosedur rapat yang diadakan oleh komite audit telah diatur dalam peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit mengadakan rapat paling kurang sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota;
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Rapat komisaris audit berfungsi sebagai media komunikasi dan koordinasi antar anggotanya dalam menerapkan fungsi pelaporan dan pengawasan terhadap perusahaan. Oleh karena itu semakin sering komite audit mengadakan rapat maka akan terkoordinasi dan tercipta komunikasi yang baik antar anggota dalam melakukan fungsi pengawasannya. Sehingga fungsi pengawasan yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan.

2.1.3.5. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum

dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dewan komisaris mengadakan rapat-rapat rutin dalam rangka mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh dewan direksi.

Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Dalam rapat tersebut akan dibahas masalah mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh manajemen, dan mengatasi masalah benturan kepentingan (FCGI, 2002 dalam Oktavianto, 2013). Sehingga semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, maka diharapkan pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dapat semakin baik dan mengevaluasi kebijakan yang diambil dewan direksi. Dengan demikian, kinerja keuangan pun semakin meningkat.

2.1.4. Struktur Kepemilikan

2.1.4.1. Kepemilikan Manajerial

Manajerial berarti suatu sistem yang mengatur hubungan antara manajer dengan bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Secara umum, manajer dapat diartikan sebagai setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya (Handoko, 2003 dalam Noviawan, 2013). Manajer dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu manajer lini (supervisor, mandor), manajer menengah (kepala seksi), dan manajer puncak

(direksi dan komisaris). Semakin tinggi tingkatan manajer akan lebih banyak fungsi administratif yang dijalankan.

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Gideon, 2005 dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Kepemilikan manajerial meliputi pemegang saham yang berkedudukan sebagai direksi maupun dewan komisaris dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial juga menyertakan kepentingan pihak manajemen sebagai pemegang saham. Dengan demikian, diharapkan manajemen akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan.

Kesempatan manajemen yang sekaligus berfungsi sebagai pemilik dapat mencegah kemungkinan munculnya *problem agency*. Hal ini disebabkan oleh dua alasan : (Ukago, Ghozali dan Sugiyono, 2005)

1. Kepemilikan manajemen (pihak dalam) akan menyelaraskan kepentingan antara manajemen dan pihak lainnya.
2. Kepemilikan perusahaan oleh manajemen (pihak dalam) juga akan mengarahkan keleluasaan manajer pada proses konsistensi dengan kepentingan pemilik.

Kepemilikan manajerial dapat berfungsi sebagai mekanisme corporate governance karena merupakan sarana pengawasan yang efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba dari manajer (Herawaty, 2008). Hal yang juga diharapkan dari adanya kepemilikan manajerial adalah manajemen dalam menjalankan perusahaan akan lebih konsisten dengan kepentingan pemilik perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan.

2.1.5. Kinerja Keuangan

Kinerja sebuah perusahaan merupakan gambaran dari tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan suatu kegiatan atau program selama periode waktu tertentu. Untuk menilai kinerja keuangan, maka dibutuhkan informasi karena informasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para investor dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kinerja perusahaan dapat diukur melalui laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik, yang dapat memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan. Info yang terkandung dalam laporan keuangan akan digunakan pihak-pihak tertentu seperti Investor, Kreditor, Manajer, Calon kreditor, Karyawan, Pemerintah dan Masyarakat yang masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Untuk menilai prestasi dan kondisi suatu perusahaan diperlukan ukuran – ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan adalah Rasio, yang menunjukkan hubungan antara 2 data keuangan perusahaan.

Analisa berbagai rasio keuangan akan memberi pemahaman yang lebih baik terhadap prestasi dan kondisi keuangan dari pada analisa hanya terhadap laporan keuangan saja. Penilaian kinerja keuangan dapat menggunakan rasio-rasio laporan keuangan seperti *Return on Equity* (ROE), *Return on Assets* (ROA), *Return on Capital Employed* (ROCE), dan *Earning per Share* (EPS). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Earning per Share* (EPS) sebagai variabel pengukur kinerja keuangan perusahaan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh mekanisme *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Fani Yulia (2009). Pada penelitian ini variabel dependen terdiri dari manajemen laba dan kinerja keuangan, penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling, kinerja perusahaan diukur menggunakan *cash flow return on asset* (CFROA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme corporate governance memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, hal ini dijelaskan oleh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Dan manajemen laba memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Indah Setiawati (2012), melakukan penelitian serupa yang dilakukan dengan metode purposive sampling, namun objek penelitian tersebut adalah 15 perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2009-2011, hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Sekaredi (2011), melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara mekanisme corporate governance dengan kinerja keuangan perusahaan. Metode pengukuran menggunakan analisis regresi linear berganda, kinerja keuangan diukur menggunakan Tobin's Q dan *cash flow return on asset* (CFROA) sebagai pengukur kinerja berdasarkan operasional perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 18 perusahaan yang secara konsisten terdaftar sebagai perusahaan LQ45 periode tahun 2005 sampai 2009. Dari lima variabel

independen, hanya kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

No.	Peneliti (tahun)	Variabel	Hasil
1.	Fani Yulia (2009) Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan	Variabel independen = kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, kepemilikan tersebar, kepemilikan terkonsentrasi. Variabel dependen = manajemen laba dan kinerja keuangan (cash flow dan ROA)	kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen memiliki berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Manajemen laba memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan
2.	Winda Nurhidayati (2010) Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan	Variabel independen = kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen Variabel dependen = kinerja perusahaan (Tobin's Q)	Kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan
3.	Sawitri Sekaredi (2011) Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan	Variabel independen = ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan institusional Variabel dependen = kinerja keuangan (Tobin's Q dan ROA)	Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dewan komisaris berpengaruh positif tidak signifikan Dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan
4.	Mendy Damara (2012)	Variabel independen = Kepemilikan	Kepemilikan institusional dan Dewan komisaris

	Pengaruh Struktur Kepemilikan, Leverage, Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan CSR dan Kinerja Perusahaan	Institusional, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan asing, Leverage, dewan Komisaris Variabel dependen = CSR dan Kinerja Perusahaan (index disclosure dan ROA)	berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan
5.	Ridho Alief (2013) Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan	Variabel independen = ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial Variabel dependen = kinerja keuangan (ROA)	Dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dewan direksi dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan

2.3. Kerangka Pemikiran

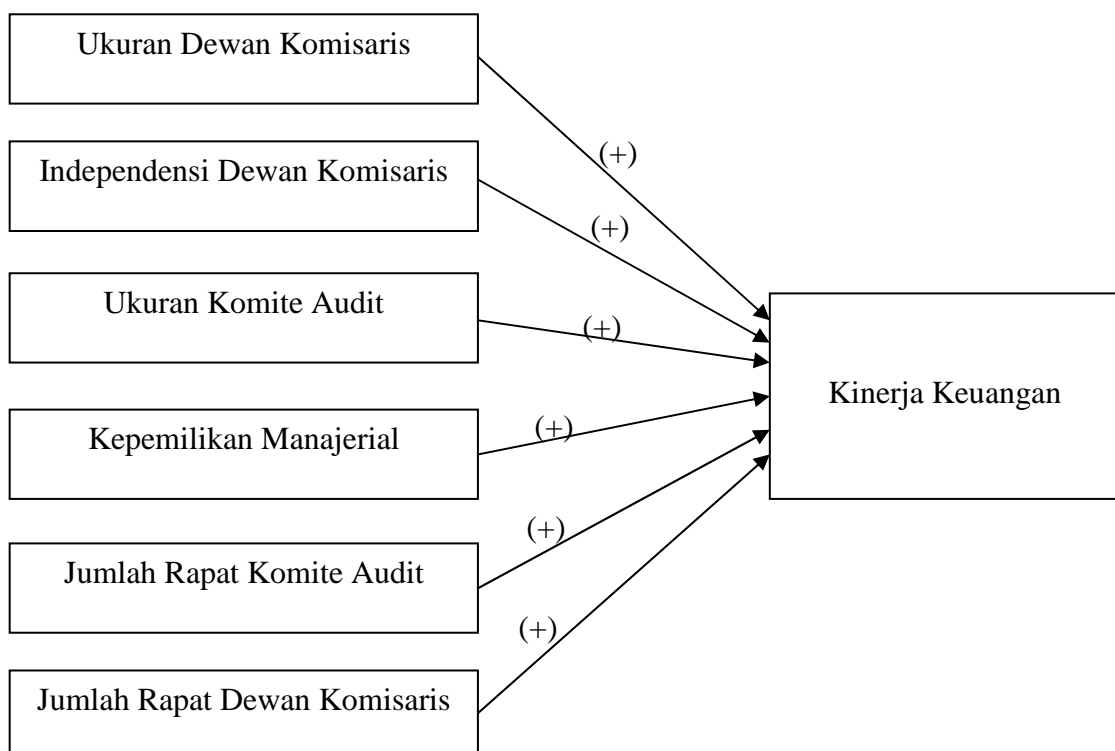
Hubungan yang logis antar variabel dalam penelitian ini akan dijelaskan dan digambarkan dalam sub-bab kerangka pemikiran ini. Pembahasan alasan dan penyajian gambar sebagai berikut. Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas serta efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya (Hastuti, 2005). Perusahaan saling berlomba untuk memaksimalkan kinerja perusahaannya, karena kinerja perusahaan yang baik akan menarik investor untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut (Marn dan Romuald, 2012 dalam Oktavianto, 2013). Mekanisme *corporate governance*

diterapkan perusahaan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja keuangan.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah mekanisme *corporate governance* yang diroyeksikan menjadi enam variabel yaitu ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan manajerial, jumlah rapat komite audit, dan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.4. Hipotesis

Berdasarkan pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan diperoleh hasil yang berbeda-beda, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji

variabel-variabel yang mempengaruhi good corporate governance pada perusahaan. Terdapat enam hipotesis dalam penelitian ini. Pembahasan mengenai rumusan hipotesis disajikan sebagai berikut:

2.4.1. Hubungan antara Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan komisaris ditugaskan untuk melakukan pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan dan memberikan masukan kepada dewan direksi perusahaan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Dewan komisaris dibentuk karena pendelegasian principal kepada agent membuat principal tidak dapat mengawasi kinerja manajer secara langsung, sehingga keputusan manajer terkadang tidak sesuai yang diinginkan oleh pemilik perusahaan. Sehingga dibentuk dewan komisaris yang memiliki fungsi untuk mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi. Karena itu dewan komisaris sangat penting dalam perusahaan yang memiliki peran dalam menjembatani kepentingan principal dalam sebuah perusahaan.

Menurut Yermack (1996) dalam penelitian Noviawan (2013) menyatakan bahwa semakin banyak anggota dewan komisaris akan memperburuk kinerja yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dengan semakin banyaknya dewan komisaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsinya dalam perusahaan, diantaranya kesulitan dalam berkoordinasi dan komunikasi antar anggota dewan komisaris.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavianto (2014) pada variabel ukuran dewan komisaris menyatakan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Dengan semakin banyaknya anggota dewan komisaris, maka pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik, masukan bagi dewan direksi menjadi lebih banyak dalam mengambil keputusan bagi perusahaan. Sehingga diperlukan penelitian yang dapat membuktikan pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.4.2. Hubungan antara Independensi Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan

Dalam teori keagenan dinyatakan bahwa konflik kepentingan antara pihak principal dan pihak agent dapat dikurangi dengan cara pengawasan yang tepat pada perusahaan, sehingga semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris akan semakin meningkatkan peran dewan komisaris dalam mengawasi dan mengontrol kinerja manajer. Untuk itu setiap perusahaan yang menerapkan corporate governance diwajibkan memiliki dewan komisaris independen. Proporsi minimum komisaris independen adalah 30% dari jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan.

Indah Setyawati (2012) dalam penelitiannya menyatakan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Namun berbeda

dengan penelitian yang dilakukan oleh Herawaty (2008) yang menyatakan jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena dalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen perusahaan. Semakin besar proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan akan menjadi lebih baik. Dengan adanya fungsi pengawasan yang lebih baik maka dapat meningkatkan kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.4.3. Hubungan antara Ukuran Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Gagasan dasar dalam menentukan komite audit adalah untuk memberdayakan fungsi komisaris dalam melakukan pengawasan (Alijoyo, 2004). Dalam penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) BEI mewajibkan seluruh perusahaan yang tercatat wajib memiliki komite audit. Anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 anggota, seorang diantaranya komisaris independen perusahaan sekaligus menjadi ketua komite, sedangkan pihak lain adalah pihak ekstern yang independen dan minimal salah satu memiliki kemampuan dibidang keuangan dan akuntansi.

Penelitian Sekaredi (2011) menunjukan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dengan semakin banyaknya anggota

komite audit, maka dapat meningkatkan efektivitas komite audit sehingga dapat mencegah praktik manajemen laba yang dilakukan manajemen. Efektifnya fungsi pengawasan juga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H3 : Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.4.4. Hubungan antara Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan manajerial perusahaan dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Proporsi jumlah kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan ada kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham (Faizal, 2005). Apabila pihak manajemen suatu perusahaan memiliki saham perusahaan, maka kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan dapat menjadi fungsi pengendalian yang efektif terhadap kinerja manajemen dalam mencegah praktik manajemen laba.

Menurut Faisal (2005), besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan shareholders. Karena semakin meningkatnya proporsi kepemilikan manajerial maka akan semakin baik kinerja perusahaan. Sehingga manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yang juga merupakan keinginan dari para pemegang saham.

Winda Nurhidayati (2010) dalam penelitiannya menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Namun Wu *et al.* (2009) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan manajerial mensejajarkan antara kepentingan manajemen dan pemegang saham sehingga dapat memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang khususnya adalah dirinya sendiri. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H4 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.4.5. Hubungan antara Jumlah Rapat Komite audit Terhadap Kinerja Keuangan

Keberadaan komite audit mempunyai peran dan pengaruh yang cukup besar bagi perusahaan. Peranan komite audit yang cukup penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dalam aspek pengendalian. Perusahaan yang memiliki komite audit biasanya manajemen perusahaan lebih transparan dan terbuka, sehingga corporate governance dapat diterapkan dengan baik dan kinerja perusahaan dapat meningkat.

Dalam melaksanakan tugasnya komite audit perlu untuk mengadakan rapat yang berfungsi sebagai media komunikasi dan koordinasi antar anggotanya dalam

menerapkan fungsi pelaporan dan pengawasan terhadap perusahaan. Jumlah rapat komite audit mengacu pada kesediaan anggota komite audit untuk bekerja sama dalam mempersiapkan, mengajukan pertanyaan, dan mengejar jawaban ketika berhadapan dengan manajemen, auditor internal, auditor eksternal, dan pihak-pihak lain yang relevan (DeZoort, 2002). Semakin sering dilakukan rapat komite audit maka akan terkoordinasi dan tercipta komunikasi yang baik antar anggota dalam melakukan fungsi pengawasannya. Sehingga semakin baik fungsi pengawasan, kinerja keuangan akan lebih baik. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H5 : Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.4.6. Hubungan antara Jumlah Rapat Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan

Dalam penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik perusahaan diwajibkan untuk memiliki dewan komisaris. Dewan komisaris ini yang bertanggung jawab untuk memonitor kinerja manajerial dalam mencapai tingkat timbal balik (return) yang memadai bagi pemegang saham.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 108 ayat (5) Dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan masukan kepada direksi dalam pengambilan keputusan. Sejalan

dalam melaksanakan tugas dewan komisaris mengadakan rapat-rapat rutin untuk mengevaluasi kebijakan yang telah diambil dewan direksi.

Rapat yang diadakan dewan komisaris tersebut guna menunjang sarana komunikasi dan koordinasi antar dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehingga semakin banyak jumlah rapat yang diadakan oleh dewan komisaris diharapkan akan semakin membantu koordinasi dewan komisaris yang nantinya memberikan imbas pada semakin baik pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dewan direksi. Sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H6 : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah mekanisme corporate governance sedangkan variabel dependennya adalah kinerja keuangan perusahaan.

3.1.1. Variabel Dependen

Variabel terikat (dependent variable) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Indriantoro, 2002). Sebagai variabel terikat (dependent variable) pada penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan EPS (*Earning Per Share*).

Kinerja perusahaan merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi suatu organisasi. Ada dua bentuk kinerja, yaitu kinerja operasional dan kinerja keuangan. Kinerja operasional lebih menekankan kepada kepentingan pihak internal perusahaan seperti kinerja cabang atau divisi yang diukur dengan menggunakan kecepatan dan kedisiplinan. Sedangkan kinerja keuangan biasanya diukur menggunakan rasio-rasio keuangan dan harga saham perusahaan dalam pasar modal (Mulyadi, 1999). Kinerja keuangan suatu perusahaan yang baik dapat

di lihat melalui laporan keuangan yang diterbitkan. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan dapat digunakan sebagai dasar menilai kinerja keuangan perusahaan. Variabel *earning per share* ini diukur secara kuantitatif dengan menghitung jumlah deviden yang dibagikan per lembar saham.

3.1.2. Variabel Independen

Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002). Variabel independent yang digunakan pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

3.1.2.1. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris ditugaskan untuk melakukan pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan dan memberikan masukan kepada dewan direksi perusahaan. Dengan semakin banyaknya dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka fungsi pengawasan terhadap dewan direksi menjadi lebih baik dan masukan untuk dewan direksi menjadi lebih banyak yang berpengaruh kepada setiap langkah atau keputusan yang diambil dewan direksi menjadi lebih baik. Sehingga berimbas pada kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Variabel ini diukur dengan jumlah seluruh dewan komisaris dalam perusahaan. Variabel ini selanjutnya akan dilambangkan dengan UKKOM.

3.1.2.2. Independensi Dewan Komisaris

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2004). Komisaris independen diukur dari proporsi jumlah anggota independen dengan jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris. Variabel ini selanjutnya akan dilambangkan dengan INKOM.

3.1.2.3. Ukuran Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggung jawab membantu auditor dalam mempertahankan independensi dari manajemen (Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2000). Dengan adanya komite audit akan memperkecil kemungkinan manajemen melakukan manajemen laba dengan cara melakukan pengawasan atas laporan keuangan dan pengawasan dari audit eksternal. Kecil kemungkinan manajemen melakukan manajemen laba membuat kinerja keuangan menjadi lebih baik. Variabel ukuran komite audit ini diukur berdasarkan jumlah komite audit yang terdapat pada suatu perusahaan. Variabel ini selanjutnya akan dilambangkan dengan UKAUD.

3.1.2.4. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Gideon, 2005

dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Kepemilikan saham oleh manajerial menyertakan kepentingan pihak manajemen sebagai pemegang saham. Sehingga, diharapkan manajemen akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Variabel ini diukur dengan proporsi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan saham perusahaan. Variabel ini selanjutnya akan dilambangkan dengan KEPMAN.

3.1.2.5. Jumlah Rapat Komite Audit

Rapat komite audit berfungsi sebagai media komunikasi dan koordinasi antar anggotanya dalam menerapkan fungsi pelaporan dan pengawasan terhadap perusahaan. Prosedur rapat yang diadakan oleh komite audit telah diatur dalam peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang mengatur rapat komite audit dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali dalam satu tahun. Dengan adanya rapat komite audit maka akan terkoordinasi dan tercipta komunikasi yang baik antar anggota dalam melakukan fungsi pengawasannya. Sehingga fungsi pengawasan yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan. Variabel ini diukur dari jumlah rapat komite audit perusahaan dalam satu tahun. Variabel ini selanjutnya akan dilambangkan dengan RAPAUD.

3.1.2.6. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, dewan komisaris mengadakan rapat-rapat rutin

dalam rangka mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh dewan direksi. Sehingga semakin sering dewan komisaris melakukan rapat, diharapkan pengawasan yang dilakukan dewan komisaris semakin baik dan semakin membantu dewan direksi dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi perusahaan. Variabel ini diukur dengan jumlah rapat dewan komisaris dalam satu tahun. Variabel ini selanjutnya akan dilambangkan dengan RAPKOM.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan data yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Sampel dipilih dari sebuah populasi untuk mewakili populasi keseluruhan populasi tersebut. Oleh karena itu, sampel yang baik adalah sampel yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasinya.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria tertentu yang dikehendaki peneliti atau purposive sampling. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang dimaksud meliputi:

1. Saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mempublikasikan laporan keuangan selama periode 2011-2013.
2. Perusahaan merupakan perusahaan jenis manufaktur.
3. Perusahaan yang memaparkan keberadaan komite audit secara lengkap dalam laporan keuangannya.

4. Informasi yang terdapat dalam laporan tahunan atau keuangan yang telah diaudit mencakup seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data adalah masukan (input) yang dapat diolah dan diproses untuk dijadikan sebagai sumber informasi. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan jenis data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya. Data –data tersebut diperoleh dari Pojok BEI Universitas Diponegoro, situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id dan berbagai literatur lainnya.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen perusahaan seperti laporan tahunan perusahaan. Studi pustaka menggunakan berbagai literatur seperti jurnal, artikel dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Dalam Ghozali (2006) disebutkan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata (mean), standar deviasi, varian, nilai maksimum dan minimum, skewness (kemencengan

distribusi), dan kurtosis. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara ringkas variabel-variabel dalam penelitian ini. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran data yang akan dianalisis.

Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Ukuran numerik ini merupakan bentuk penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih ringkas dan sederhana yang pada akhirnya mengarah pada suatu penjelasan dan penafsiran

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1. Uji Normalitas

Tujuan melakukan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Menurut Ghozali (2006), ada dua cara untuk mengetahui apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

Uji normalitas dengan analisis grafik seringkali dapat menyesatkan jika tidak dilakukan dengan hati-hati secara visual akan terlihat normal. Oleh karena itu, dianjurkan selain menggunakan analisis grafik, penelitian juga menggunakan analisis statistik. Ada dua cara untuk mengetahui normalitas distribusi residual data dengan analisis statistik.

Yang pertama adalah dengan analisis grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal dan dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk

satu garis lurus diagonal, dan ploing data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Yang kedua adalah dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Jika nilai probabilitas (Kolmogorov-Smirnov) < taraf signifikansi, maka distribusi data dikatakan tidak normal dan Jika nilai probabilitas (Kolmogorov-Smirnov) > taraf signifikansi, maka distribusi data dikatakan normal.

3.5.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model. Jika titik-titik tersebar secara tidak beraturan baik diatas maupun dibawah sumbu Y maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2.3. Uji Multikolonieritas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi suatu korelasi diantara variable-variabel bebasnya. Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal* (Ghozali, 2006). Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen. Guna mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

3.5.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t - 1$). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari auto korelasi. Pengujian ada tidaknya autokorelasi dapat diketahui dari uji Durbin-Watson (DW), dan hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai Durbin-Watson (DW).

3.5.3. Analisis Regresi

Analisis Regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen (Gujarati dalam Ghozali, 2006). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (multiple linear regression). Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Model pengujian dalam penelitian ini dinyatakan dalam persamaan dibawah ini:

$$\text{EPS} = \beta_0 + \beta_1\text{UKKOM} + \beta_2\text{INKOM} + \beta_3\text{UKAUD} + \beta_4\text{KEPMAN} + \beta_5\text{RAPAUD} + \beta_6\text{RAPKOM} + e$$

Keterangan:

EPS	: Earning Per Share (proxy dari kinerja keuangan)
β_0	: Intercept/Konstanta
$\beta_1\text{UKKOM}$: Ukuran Dewan Komisaris
$\beta_2\text{INKOM}$: Independensi Dewan Komisaris
$\beta_3\text{UKAUD}$: Ukuran Komite Audit
$\beta_4\text{KEPMAN}$: Kepemilikan Manajerial
$\beta_5\text{RAPAUD}$: Jumlah Rapat Komite Audit

β_6 RAPKOM : Jumlah Rapat Dewan Komisaris

e : kesalahan residual/error

3.5.4. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dilakukan untuk mendapatkan bukti apakah hipotesis yang telah dibuat, diterima atau ditolak. Penelitian ini menggunakan regresi logistik untuk menguji seluruh hipotesis yang ada. Model ini digunakan untuk melihat kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan dengan variabel-variabel yang sama.

3.5.4.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik – t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independent secara individual dalam meneangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji t dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5 persen, dengan kata lain jika $P(\text{probabilitas}) > 0,05$ maka dinyatakan tidak signifikan.

3.5.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas yang terdapat dalam persamaan regresi secara keseluruhan berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikansi < 0.05 , maka suatu variabel independen merupakan menjelaskan variabel dependen secara signifikan.

3.5.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) ini digunakan untuk menggambarkan

kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen (Ghozali, 2006). Dengan pengukuran koefisien determinasi ini akan dapat diketahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtut waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2006).